

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Gerakan Sosial banyak terjadi diberbagai sudut penjuru dunia. Gerakan Sosial biasanya terjadi karena adanya ketidak adilan yang membuat kesejahteraan menjadi hal yang sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Gerakan Sosial juga terbentuk dari kondisi yang kurang baik seperti yang dikatakan sebelumnya. Hal tersebut yang membuat gerakan sosial terlahir dan akhirnya banyak dipraktikan untuk memperjuangkan keadilan. Dalam hal tersebut Robert Mirsel juga mengatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi apabila suatu masyarakat tidak dianggap sebagai suatu entitas yang sama dengan yang lainnya, yang mana adanya ketidakadilan yang menyebabkan masyarakat bergerak bersama melakukan gerakan sosial.<sup>1</sup>

Kesejahteraan bukan hanya sebuah utopia yang diidamkan setiap orang. Kesejahteraan akan terlahir apa bila adanya kebutuhan yang terpenuhi bagi masyarakat yang berasal dari berbagai aspek. Hal tersebut merupakan hal yang diinginkan oleh kebanyakan masyarakat bagian Utara dari Kabupaten Bekasi. Hal tersebut disebabkan adanya keadaan yang memprihatinkan, baik itu pada masyarakatnya sendiri yang telah mendapat banyak stigma, maupun dari aspek ekonomi dan politik di daerah bagian Utara tersebut. Hal tersebut menjadikan permasalahan yang baru bagi masyarakat bagian Utara, Kabupaten Bekasi. hal tersebut membuat masyarakat Kabupaten Bekasi bergerak dan mulai membuat gerakan untuk melakukan perbaikan kesehteraan. Usaha tersebut melahirkan ALU (Aliansi Utara) dan dilanjutkan dengan FKMATA (Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara). Hal tersebut juga membuat ALU (Aliansi Utara) yang dapat dikatakan sebagai lembaga kajian dan pengembangan masyarkat ikut serta terpanggil dengan keresahan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, ketua dari ALU juga beranggapan bahwa keadaan yang memprihatikan tersebut merupakan ulah dari

---

<sup>1</sup> Robert Mirsel. *"Teori Pergerakan Sosial"* (Yogyakarta: Resist Book, 2006)

pemerintahan daerah yang tidak mampu memberikan kesejahteraan secara merata pada Kabupaten Bekasi tepatnya pada bagian Utara. Tindakan tersebut pada akhirnya melahirkan banyak permasalahan baru yang makin banyak dan makin sulit untuk ditangani, salah satunya adalah kemiskinan yang telah menjadi struktural. Hal tersebut diutarakan oleh Presiden ALU tersebut pada tahun 2008 melalui tulisannya di internet. Dalam melaksanakan pembanguana pun pemerintah selalu mendirikan infrastruktur yang memberikan keuntungan bagi pihak swasta dan golongannya. Hal tersebut pun dilakukan tanpa menghiraukan dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama pada masyarakat bagian Utara.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat atau lebih ramah disebut ALU (Aliansi Utara) pada akhirnya membantu dalam mencari solusi terhadap permasalahan masyarakat yang dapat dikatakan telah berkembang menjadi rumit. Aliansi Utara ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Akan tetapi, pada konteks ini ALU juga dapat dikatakan sebagai inisiator dalam memberikan solusi terhadap masalah masyarakat Utara, yaitu dengan melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai wacana pada tahun 2008, yang mana dapat dikatakan pula sebagai kunci bagi kesejahteraan yang diimpikan oleh masyarakat Utara, Kabupaten Bekasi. Keseriusan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini ditunjukkan dengan dibentuknya kepanitiaan khusus untuk menangani permasalahan kesejahteraan masyarakat Utara. Kepanitiaan tersebut disebut P3KB (Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi). pada awalnya kepanitiaan tersebut hanyalah bersifat *ad hoc*. Akan tetapi, pada tahun 2009 bersamaan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap DOB (Daerah Otonomi Baru) pemekaran Kabupaten Bekasi.<sup>2</sup> P3KB akhirnya dilegalkan dengan melalui surat

---

<sup>2</sup> Diah Yuli Sugiarti, “Mengenal Lebih Dekat Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB)”, diakses dari <https://bekasimedia.com/2019/06/11/mengenal-lebih-dekat-panitia-persiapan-pemekaran-kabupaten-bekasi-p3kb/>, (diakses pada 8 September 2020, Pukul 22.00 WIB).

keputusan DPRD No 17/KEP/172.2/DPRD/2009 yang diikuti persetujuan tersebut dengan calon ibu kota dari Kabupaten Bekasi Utara merupakan Tambelang.<sup>3</sup>

Keseriusan Aliansi Utara dalam membentuk kepanitiaan tersebut bukan hanya berdasarkan pada aspek kemiskinan, aspek ekonomi dan aspek politik semata. Akan tetapi, berdasarkan banyak permasalahan, bahkan hingga permasalahan yang mungkin dianggap sebagian orang sepele, seperti jarak kantor administrasi yang sangat jauh bagi masyarakat Utara. Pada permasalahan yang timbul di bagian Utara, Kabupaten Bekasi ini dapat dilihat juga dari sudut geografis. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya pemanfaatan sumber daya minyak, laut dan sebagainya yang dapat dikelola lebih baik lagi agar dapat menyejahterakan masyarakat bagian Utara. Akan tetapi, pada nyatanya sumberdaya tersebut tidaklah dimanfaatkan dengan baik bahkan pemerintah hanya berfokus pada bagian Selatan dari Kabupaten Bekasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya bangunan industri yang berdiri dan juga menghasilkan limbah yang berakhir di bagian Utara dari Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menunjukkan bukan hanya tidak diperhatikan sumber dayanya, tetapi juga lingkungan dari bagian Utara yang tidak mendapatkan perhatian secara signifikan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga berdampak buruk bagi sektor perekonomian, pendidikan, sosial dan budaya di bagian Utara.

Jika ditilik kebelakang pada sekitar tahun 1982, terdapat banyak harapan dari masyarakat bagian Utara yang dapat diartikan sebagai kesejahteraan pula. Pada masa itu terdapat kali buatan CBL (Cikarang Bekasi Laut), yang mana CBL merupakan aliran buangan dari sungai antara Cikarang dan Bekasi. kali tersebut diharapkan dapat memberikan ekosistem yang layak bagi hewan dan juga manusia, yang mana kali tersebut memiliki fungsi sebagai pembuangan air gar tidak terjadi banjir dan juga untuk menambah pendapatan ikan dari laut. Akan tetapi, harapan ekosisten tersebut tidaklah tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh limbah yang mengalir dari hulu Bekasi hingga

---

<sup>3</sup> Ibid

hilir Cikarang. Hal tersebut juga mengakibatkan berubahnya warna kali menjadi hitam kotor yang disebabkan limbah B3. Tidak hanya itu saja, tetapi usaha lokal yang memanfaatkan hasil laut juga ikut terpengaruh yang mengakibatkan menurunnya pendapatan warga di sekitaran kampung sembilang.

Dapat dilihat permasalahan yang ditimbulkan memiliki dampak bagi berbagai sektor. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan Aliansi Utara (ALU) sebagai pelopor melakukan pemekaran wilayah demi kesejahteraan bukan hanya berdasarkan bualan. Dengan gerakan yang dibuat oleh Aliansi Utara (ALU), maka dapat dilihat akan terdapat banyak aspek yang terselamatkan dengan kerjasama dari masyarakat dan juga LSM, serta pemerintah. Hal tersebut tidak hanya untuk kepuasan sementara bagi masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut juga akan berdampak pada generasi selanjutnya yang akan memimpin Kabupaten Bekasi bagian Utara. Berdasarkan permasalahan tersebut gerakan ini ingin agar secepatnya usaha pemekaran dapat dilakukan.

Adanya berbagai masalah tersebut dapat diaktakan bahwa opsi pemekaran wilayah dapat diaktakan sebagai keharusan yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut. pemekaran wilayah juga memiliki tujuan untuk membuat pemerintah daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Hal tersebut akan membuat pemerintah bisa lebih peka dan melihat keadaan yang dialami oleh masyarakatnya. Dengan adanya pemerkanan wilayah, maka pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Pada dasarnya usaha untuk melakukan pemerkanan wilayah bukanlah suatu tindakan yang dilarang dan diharamkan asalkan masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Pada saat wacana yang diberikan DPRD telah diterima oleh Sa'adudin selaku Bupati Bekasi pada saat itu, maka Bupati Bekasi itupun melakukan kajian bersama Prof. Sadu yang saat ini telah menjabat sebagai ketua dari tim kajian *Desk CDOB*

---

<sup>4</sup> J.R. Kaho, "Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia" (Yogyakarta: PolGov, 2012).

Gubernur Provinsi Jawa Barat dan beliau juga memiliki jabatan di kemandagri (Kementerian Dalam Negeri) sebagai ketua tim. Hasil kajian beliau mengenai kelayakan dan juga respon dari masyarakat terkait akan pemekaran wilayah memberikan hasil yang baik bagi Aliansi Utara (ALU). Hal tersebut dilakukan dengan kucuran dana dari Bupati Bekasi sebesar 1 Milyar. Kajian tersebut dilakuakn selama 6 bulan dan menunjukkan bahwa wacana ini sungguh mendapat respon yang baik dari berbagai pihak yang bersangkutan. Dilansir dari berita lokal Bekasi, hasil kajian tersebut menunjukkan keinginan pemekaran tersebut juga merupakan keinginan dari 83% rakyat.<sup>5</sup> Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan tersebut merupakan keinginan murni pula dari rakyat bagian Utara.

Tidak hanya datang dari tokoh masyarakat, tetapi juga muncul FKMATA yang melakukan tindakan dengan tujuan yang sama dengan Aliansi Utara. Dilansir dari portal online dikatakan bahwa FKMATA merasa prihatin terhadap apa yang sudah dilakukan lebih kurang 16 tahun oleh Aliansi Utara dalam usaha melakukan pemekaran. ALU dan FKMATA memiliki tujuan yang sama tetapi berada di jalur yang berbeda. Dalam pernyataan ketua FKMATA, yaitu Syamsuri mengatakan bahwa FKMATA melakukan usaha percepatan pemekaran wilayah yang sebelumnya tela dilakukan oleh ALU. Dalam usanya tersebut FKMATA telah merangkul berbagai kalangan mulai dari pengurus karang taruna dari 13 kecamatan, ORMAS dan LSM untuk menatukan visi dan misi dalam usaha percepatan tersebut. jika dipahami lebih lanjut lagi dapat dikatakan bahwa FKMATA hadir untuk meneruskan dan melakukan percepatan dalam usha pemekaran wilayah di Kabupaten Bekasi Bagian Utara.

Sejauh ini publikasian yang telah dilakukan oleh FKMATA telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Bekasi BN Holik Qodratuallah yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020. Pertemuan tersebut direspon baik dan juga

---

<sup>5</sup> DNS, “Hasil Kajian Akademis, 83 Persen Warga Bekasi Utara Ingin Tentukan Nasibnya Sendiri”, diakses dari <https://gerbangpatriot.com/2019/06/13/hasil-kajian-akademis-83-persen-warga-bekasi-utara-ingin-tentukan-nasibnya-sendiri/>, (diakses 10 September 2020, Pukul 16.51 WIB).

penuh dukungan atas apa yang dilakukan oleh FKMATA dalam usaha pemekaran Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hal tersebut ketua DPRD Bekasi juga menghimbau agar FKMATA dapat bersinergi dengan ALU dalam mengusahakan pemekaran Kabupaten Bekasi. Holik juga menegaskan bawa dukungannya teradap pemekaran ini juga sudah terlandasi dengan adanya persetujuan dari Bupati terdahulu, yakni Sa'dudin dan telah diparipurnakan pada tahun 2009. Dalam pertemuan tersebut jga ketua dari FKMATA memberikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh ketua DPRD Bekasi. ketua FKMATA juga mengatakan bahwa usaha mereka adalah mewujudkan kesejahteraan yang didambakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi bagian Utara dan juga beliu menegaskan agar para dewan dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Setela melakukan audiensi dengan keua DPRD Bekasi FKMATA melakukan pembuatan ala tim inti dalam usahanya membuat pergerakan pemekaran Kabupaten Bekasi. Pertemuan yang dilaksanakan pada 26 November 2020 itu FKMATA melakukan usaha pembuatan tim inti guna melakukan percepatan dalam pemekaran wilayah. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, akademisi dan juga perwakilan lsm dan ORMAS. Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa usaha yang dilakukan sekarang adalah menunggu tindakana dari eksekutif dan legilatif, yang mana hal tersebut memiliki payung hukum yang jelas dalam usha pemekaraan wilayah.

Menurut peneliti, penelitian mengenai gerakan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi yang dipelopor Aliansi Utara (ALU) bersama P3KB (Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi) dan FKMATA merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitain tersebut hal yang lebih menarik merupakan target mereka dalam memeperjuangkan pemekaran daerah dari 2006 hingga saat ini 2020 yang telah memakan kurun waktu 14 tahun. Hal tersebut dapat dikatakan menarik karena banyak terjadi pasang surut dalam usaha tersebut memperjuangkan kesejahteraan yang tidak pernah didapatkan oleh masyarakat bagian Utara Kabupaten Bekasi. sedangkan jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, yakni ilmu politik penelitain mengenai gerakan

pemekaran wilayah yang diperjuangkan oleh Aliansi Utara dan FKMATA ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu politik. Pengetahuan merupakan bagian dari gerakan sosial baru, yakni gerakan mengharapkan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang berlangsung lama dan tidak memiliki keinginan untuk mencari peluang bagi anggotanya untuk bergabung dengan pemerintahan dengan tujuan mendapatkan jabatan yang strategis di kursi pemerintahan. Akan tetapi, gerakan tersebut berfokus untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya dan membantu menyadarkan pemerintah bahwa adanya ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat bagian Utara dari Kabupaten Bekasi. Ketidakadilan tersebut berupa ketimpangan antar masyarakat selatan yang besar karena industri dan infrastruktur yang memadai dengan masyarakat bagian utara yang sumberdaya dan infrastrukturnya tidak memadai.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses terbentuknya gerakan masyarakat Kabupaten dalam mewujudkan Pemekaaan Kabupaten Bekasi?
2. Strategi apa yang dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi Utara oleh gerakan masyarakat Kabupaten Bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian baiknya mengandung keterkaitan dalam tujuannya dengan rumusan masalah.<sup>6</sup> Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparka oleh penulis, tujuan dari penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya gerakan masyarakat Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi dan isu apa saja yang telah ditangani.

---

<sup>6</sup> Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 69

2. Untuk mengetahui Strategi apa yang dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi Utara oleh gerakan masyarakat Kabupaten Bekasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan manfaat yang didapatkan setelah penelitian diselesaikan, yang mana hal tersebut bukan seperti mafaat yang didapatkan oleh peneliti, baik secara individu ataupun secara subjektif dari peneliti.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- Secara akademis manfaat yang akan didapat dari penelitian ini berupa penambahan pemahaman dalam bidang kajian yang berfokus pada gerakan sosial politik yang berhubungan dengan gerakan dalam skala regional. Dalam hal lain pula penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai gerakan masyarakat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bekasi yang dimotori lembaga kajian dan pengembangan masyarakat Aliansi Utara (ALU) dan Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara (FKMATA). Tidak hanya itu, penelitian ini juga dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan ALU dan FKMATA dalam mengola isu di Kabupaten Bekasi bagian Utara dan mengetahui strategi yang digunakan agar dapat mewujudkan pemekaran Kabupaten Bekasi.
- Secara praktis memiliki mafaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang berada pada bagian yang akan dimekarkan bahwa hal tersebut memiliki tujuan bagi kesejahteraan masyarakat bagian utara Kabupaten Bekasi. diharapkan juga agar dapat memberikan informasi mengenai Aliansi Utara (ALU) dan Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegaran FKMATA sebagai motor penggerak pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi serta aktif berperan dalam menangani isu di

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 70



bagian Utara Kabupaten Bekasi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk membahas topik ini. Akan tetapi, dapat dipraktikkan dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Serta penelitian ini juga dapat berguna bagi mahasiswa ilmu politik yang mungkin tertarik untuk mempelajari Gerakan Sosial Politik.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Mobilisasi Sumber Daya**

Banyaknya rintangan dan juga cobaan dalam memperjuangkan gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Utara (ALU), maka peneliti melihat fenomena tersebut dengan memanfaatkan teori mobilisasi sumber daya. Hal tersebut disebabkan bahwa teori mobilisasi sumberdaya dapat dikatakan menjadi kerangka acuan yang dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan juga tindakan kolektif, yang mana hal seperti yang dikatakan oleh Buecheler (1993:217) dalam Sukmana. Dalam teori MSD ini juga dikatakatakan oleh Anthony Oberschall dalam Sukmana bahwa ketidakpuasan dapat melahirkan suatu gerakan.<sup>8</sup> Teori ini juga dianggap oleh peneliti mampu untuk melihat berjalannya dan juga bertahannya suatu gerakan sosial. Sebelum ditilik lebih lanjut, teori mobilisasi sumberdaya merupakan bentuk reaksi terhadap pendapat para teoritisi lama yang didominasi oleh para ahli sosiologi, yang mana mereka mengatakian bahwa untuk meneliti partisipan dalam suatu gerakan sosial dapat dilihat berdasarkn sifat-sifat dasar kepribadian manusai, seperti adanya ketidakpuasan, keterasingandan juga bahkan ketidak puasan. Akan tetapi, hal tersebut direspon dengan banyak pertanyaan oleh para ahli sosiologi yang memiliki pemikiran sama dengan Anthony Oberschall. Singh (2010) dalam Sukmana juga meberikan argumen bahwa gerakan sosial baru merupakan suatu gerakan yang terorganisir seacara rasional.<sup>9</sup> Seperti yang dikataka peneliti sebelumnya para ahli sosiolgi, seperti Anthony Oberschall memberikan

---

<sup>8</sup> Oman Sukmana, Oman Sukmana, , *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm 172

<sup>9</sup> Ibid, hlm 171

pendapatnya dengan mengeluarkan teori *Resource Mobilization Theory* untuk meng-counter teori Komhauser mengenai *Mass Society Theory*, yang pada saat itu menjadi teori paling dominan digunakan untuk menganalisis gerakan sosial. Oberschall dalam Sukmana berpendapat bahwa teori yang dikemukakan oleh Komhauser tidak dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada saat perang dunia ke-1 dan ke-2.

Teori Mobilisasi Sumberdaya berfokus pada proses sosial yang menjadi faktor dalam berhasilnya dan lahirnya suatu gerakan. Berbeda dengan teori deprivasi relatif dan mass teori yang menghiraukan faktor ekonomi dan politik serta lebih cenderung mengfokuskan sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan, teori Mobilisasi Sumberdaya berjalan sebaliknya. Dalam teori Mobilisasi Sumberdaya dikatakan bahwa jika adanya ketidakpuasan yang terjadi pada suatu masyarakat, maka hal tersebut telah cukup untuk melahirkan suatu gerakan sosial. Dalam berjalannya suatu gerakan juga kepemimpinannya dan juga organisasi dapat menjadi faktor sebagai motif ataupun menjadi penghambat dalam gerakan sosial.

Menurut Oberschall yang juga didukung oleh para ahli lain, seperti McCarthy, Gamson dan Tilly yang ditulis Pichardo (1988) dalam Sukmana dikatakan bahwa dalam teori Mobilisasi Sumberdaya diperlukan berbagai elemen dalam menjalankan suatu gerakan, seperti sumberdaya dan juga bagaimana cara sumberdaya tersebut dapat digunakan dalam gerakan sosial.<sup>10</sup> Dalam teori ini fokus yang digunakan berfokus pada isolasi pemahaman dalam kekuatan yang berkontribusi dalam lahirnya suatu gerakan, terkhusus dalam persyaratan yang meliputi keadaan fisik dan lingkungan yang akan menjadi pengaruh dalam berjalan dan berkembangnya suatu gerakan sosial itu sendiri. Hal tersebut merupakan konsep dasar dari munculnya Teori Mobilisasi Sumberdaya.

### **1.5.3.1 Model Analisis Teori Mobilisasi Sumberdaya**

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 173

Menurut Pichardo (1988) yang ditulis Triwibowo (2006) dalam Sukmana terdapat dua model analisis dalam teori Mobilisasi sumberdaya, yakni *The Political-interactive model* dan *The Organizational-entrepreneurial*.<sup>11</sup>

#### 1. *The Political-interactive model*

Model analisis yang dikembangkan oleh Oberschall dan beberapa peneliti lain lebih berfokus pada perlu adanya perubahan dalam menjalankan aksi bersama. Hal tersebut didukung dengan eksistensi jaringan dan ikatan horisontal yang terbangun dari para kumpulan individu yang tertindas (*aggrieved group*) yang akan menjadi faktor dalam kesuksesan gerakan sosial. Keberhasilan model ini berfokus pada hubungan gerakan sosial dan negara dan diborder oleh sistem politik. Hal tersebut diartikan bahwa keberhasilan gerakan sosial akan sulit untuk dicapai apabila negara terlalu kuat dan juga memberikan sifat represif, demikian juga dengan sebaliknya. Pichardo (1988) dalam Sukmana menekankan model ini bergantung pada kapasitas dari internal dan juga komunitas yang pada akhirnya akan menghasilkan organisasi gerakan sosial.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pandangan Oberschall. Hal tersebut disebabkan *The Political-interactive model* lebih cocok untuk menganalisis dinamika dalam gerakan sosial. Tidak hanya itu, Oberschall juga menyatakan di tulisan Locher (2002) dalam Sukmana bahwa gerakan sosial akan lebih mudah lahir apabila berasal dari kelompok yang tersegmentasi.<sup>13</sup> Hal tersebut disebabkan jika kelompok sosial tersegmentasi maka akan menarik berbagai klangan dan juga hal tersebut akan memungkinkan untuk dimobilisasi dalam *Sosial Movement Organization* (SMO).

#### **1.5.3.2 Faktor Determinan Teori Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakann Sosial**

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 174

<sup>12</sup> Ibid, hlm 175

<sup>13</sup> Ibid, hlm 175

Berdasarkan dari pembagian yang ada pada teori Mobilisasi Sumberdaya, maka dapat dijelaskan terdapat faktor determinan dalam teori tersebut, terdapat lima faktor penting yang dapat dilihat dari teori tersebut, yakni organisasi gerakan sosial, pemimpin dan kepemimpinan, sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya, jaringan dan partisipasi, peluang dan kapasitas masyarakat. Faktor- faktor tersebut digunakan oleh peneliti guna mengetahui keberhasilan suatu gerakan sosial. Akan tetapi, suatu gerakan sosial tidak harus memenuhi seluruh faktor tersebut agar dikatakan berhasil. Faktor tersebut lebih tepatnya akan memberikan indikator keberhasilan yang kelak akan dicapai dalam suatu gerakan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan lima faktor determinan tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Organisasi Gerakan Sosial ( Sosial Movement Organization)

Secara general organisasi gerakan sosial dapat dimaknai sebagai organisasi sosial yang berifat kompleks atau formal, yang mana memiliki tujuan untuk menggapai *goals* mereka yang telah diterapkan pada gerakan sosial.<sup>14</sup> Sedangkan, menurut Oberschall yang ditulis Locher (2002) dalam Sukmana dikatakan bahwa kegagalan atau keberhasilan suatu gerakan sosial dapat dilihat dengan seberapa banyak partisipan yang terasosiasikan ke dalam organisasi, bagaimana mengorganisir, apa saja pengorbanan dan mengapa mereka masih bertahan dalam menghadapi oposisi.<sup>15</sup>

#### 2. Pemimpin dan Kepemimpinan

Dalam gerakan sosial sosok pemimpin merupakan faktor paling penting dan juga dianggap krusial. Hal tersebut disebabkan pemimpin memiliki fungsi yang sangat penting dalam gerakan sosial. Dalam suatu gerakan sosial pemimpin dapat menginspirasi kelompok, dapat memanfaatkan sumberdaya, dapat memahami dan membaca kondisi, mampu memunysusn strategi, menyusun berbagai tuntutan dan juga dapat

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 177

<sup>15</sup> Ibid

mempengaruhi hasil.<sup>16</sup> Dalam gerakan sosial pemimpin memiliki risiko yang tinggi dan juga tanggung jawab yang besar tidak hanya bagi anggotanya juga bagi organisasinya. Akan tetapi, pemimpin juga mendapatkan benefit yang cukup besar dari keberhasilan suatu gerakan sosial. Sedangkan, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuannya.<sup>17</sup> Mengacu pada pandangan Oberschall yang ditulis Snow, Soule, dan Kriese (2004) dalam Sukmana mengatakan bahwa kehadiran pemimpin yang potensial selalu ada dalam masyarakat, tetapi kehadiran mereka bergantung pada peluang politik yang ada.<sup>18</sup>

### 3. Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya

Dalam mendapatkan dan juga mengelola sumberdaya terdapat beberapa cara dan juga terdapat bentuk sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Edward dan McCarthy yang ditulis Snow, Soule dan Kriese dalam Sukmana yang disebutkan bahwa terdapat 5 bentuk sumberdaya yang dapat dikelola dalam konteks *social movement*, yaitu Sumberdaya moral, Sumberdaya Kultural, Sumberdaya Organisasi Sosial, Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Material.<sup>19</sup> Tidak hanya itu, ada juga cara yang dapat dilakukan oleh para aktor gerakan untuk dapat mengelola dan mengakses sumberdaya yang telah dijelaskan, yakni pengumpulan atau agregasi, produksi-diri, pengambilan atau kooptasi dan perlindungan.<sup>20</sup> Setidaknya menurut Edward dan McCarthy empat mekanisme tersebut dapat membantu para aktor gerakan.

Dalam bentuk sumberdaya yang dikatakan sebelumnya yang dimaksud dengan sumberdaya moral dapat dikatakan berupa legitimasi yang didapat dari kelompok yang tergabung dalam organisasi sosial dan juga sumber dari eksternal. Sumberdaya Kultural merupakan bentuk sumberdaya yang berupa kompetensi ataupun pengetahuan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola suatu gerakan sosial. Sumberdaya

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 181

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid, hlm 183

<sup>19</sup> Ibid, hlm 185

<sup>20</sup> Ibid

Organisasi-Sosial akan mampu untuk membantu gerakan sosial dalam meningkatkan mobilitas dalam gerakan sosial dan juga dapat mejadi sarana untuk memperluasa sarana informatif terkait dari gerakan sosial tersebut. Sumberdaya Manusia merupakan sumber yang dapat dikatakan sebagai sumber yang dapat dilihat karena dalam sumberdaya ini yang lebih dilihat dapat berupa skill, pengalaman ataupun keamana. Terakhir terdapat sumberdaya material yang merupakan sumberdaya yang sama dengan manusia, yaitu sumberdaya yang nyata yang dapat dimanfaatkan dan juga bersifat fungsional dibanding dengan sumberdaya yang lainnya.

#### 4. Jaringan dan Partisipasi

Gerakan sosial merupakan gerkan kolektif yang dilakukan untuk mendapatkan ataupun menolak perubahan sosial. Dalam melakukan usha tersebut partisipasi dari individu, kelompok dan organisasi menjadi nilai penting yang harus dimiliki dalam suatu gerakan sosial. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai aspek yang meningkatkan indikator keberhasilan dalam melakukan gerakan sosial. Sedangkan Jaringan sosial menurut Passy dan Guini (2001: 127) dalam Sukamana merupakan simpul yang terbentuk dari kumpulan ikatan dan juga memiliki dampak terhadap partisipasi dalam suatu gerakan.<sup>21</sup> Dalam hal tersebut dapat dikatkan baha aktor dianalogikan sebagai simpul dan individu atau kelompok sebagai ikatakan yang mana meraka salaing terhubung dan tersinergi secara bersamaan.s<sup>22</sup>

#### 5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Pendekatan yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana lahirnya dan bagaimana kekuatan dari organisasi lokal yang berbasis dengan bentuk tindakan kolektif merupakan pendekatan sumberdaya dan organisasi.<sup>23</sup> Pendekatan ini lebih berfokus pada gerakan sosial yang terorganisir dalam teori mobilisasi sumberdaya.

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 189

<sup>22</sup> Ibid, hlm 191

<sup>23</sup> Ibid, hlm 193

Dalam memanfaatkan sumberdaya yang begitu banyak maka aktor gerakan juga harus dapat memanfaatkan sumberdaya eksternal yang dapat dilihat sebagai peluang dalam memaksimalkan sumberdaya. Hal tersebut tentunya akan berhubungan dengan masyarakat lokal. Sumber yang didapat dari sumberdaya eksternal dapat berupa non-profit, profit, pribadi yang dapat digunakan untuk mensupport aktivitas dan kegiatan khusus. Dalam hal ini hubungan yang terbangun antara mobilisasi sumberdaya dan juga aktivitas terorganisir yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Terdapat rumusan model pemahan yang dibuat oleh Hunter dan Stggenborg, sebagai berikut:<sup>24</sup>

## **1.6 Kerangka Konseptual**

### **1.6.1 Gerakan Sosial**

Dalam studi gerakan sosial tentu memiliki pemetaan dan arahan yang terjadi dalam suatu fenomena gerakan sosial. Untuk mengetahui hal tersebut terdapat dua perspektif dalam kerangka pemetaan dari gerakan sosial yang berhasil dikembangkan oleh Rajendra Singh dan Nick Crossly.<sup>25</sup> Pada dasarnya studi mengenai gerakan sosial yang terjadi di Indonesia menempatkan kiblatnya pada pemetaan kerangka analisi yang dibuat oleh Rajendra Singh. Dalam tulisannya Singh mengatakan bahwa studi gerakan sosial secara teoritis dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu Klasik, Neo-Klasik dan Gerakan Sosial Baru (kontemporer).<sup>26</sup> Selanjutnya Singh juga mengatakan bahwa setiap klasifikasi memiliki gelombangnya masing-masing, seperti pada gelombang klasik yang terjadi banyak di respon oleh para psikolog sosial terutama pada psikolog barat. Hal tersebut disebabkan pada tradisi klasik lebih banyak meliputi studi perilaku kolektif yang lebih mudah dipahami oleh para ahli psikologi sosial. Bentuk tradisi klasik tersebut dapat berupa, kerumunan (*Crowd*), kerusuhan (*Riot*), penolakan (*Rebel*). Untuk memahami studi kasus kolektif yang terjadi pada gelombang klasik ini terdapat para ahli dan ilmuan psikologi yang berkontribusi untuk memahami lebih

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 194

<sup>25</sup> Oman Sukmana. Op.Cit., hlm. 18

<sup>26</sup> Ibid

lanjut dari bentuk tradisi klasik tersebut, seperti karya dari Gustab Le Bon mengenai *The Crowd* (1909) atau karya E. D. Martin mengenai *The Behavior of Crowd* (1929) dan masih banyak lagi.<sup>27</sup>

Pada gelombang kedua yang telah banyak dominan pada tahun 1970-an bentuk dari gerakan sosial telah banyak berubah mengarah ke bentuk neo-klasik atau lebih sering disebut sebagai gerakan sosial lama. Pada gelombang ini berbeda dengan gelombang yang pertama pada saat bentuk klasik. Hal tersebut ditunjukkan dari keikutsertaan para ahli yang lebih didominasi oleh para ahli sosiolog barat dan juga India. Dalam bentuk neo-klasik ini juga terdapat dua model tradisi neo-klasik dalam pengembangan modelnya, yaitu fungsional dan dialektika marxis.<sup>28</sup>

Sedangkan pada gelombang ketiga yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an menurut Singg merupakan gelombang yang dikenal dengan bentuk tradisi Gerakan Sosial Baru (kontemporer). Dalam gelombang ini banyak terjadi pada masyarakat yang berada dikalangan Eropa dan Amerika.<sup>29</sup> Hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat dari Eropa dan Amerika telah menyaksikan permasalahan yang timbul terkait permasalahan kemanusiaan, budaya dan juga permasalahan non-materialistik. Gerakan Sosial Baru juga memiliki tujuan dan juga nilai yang bersifat general, yakni memberikan perlindungan dan juga mempertahankan situasi dan kondisi manusia kearah yang lebih baik lagi. Berbeda dengan tujuan yang diusung oleh gelombang neo-klasik yang hanya terjebak dalam permasalahan ideologi seperti revolusi dan perjuangan kelas ataupun permasalahan kapitalisme. Akan tetapi, dalam strategi dan tujuan gerakan sosial baru memiliki sedikit kemiripan dengan neo-klasik, yakni dalam isu ketidakadilan ekonomi, pemanfaatan kelas dan juga kenaikan upah buruh.<sup>30</sup>

### 1.6.2 Pemekaran Wilayah

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid



Pemekaran Wilayah atau yang lebih akrab disebut pemekaran daerah merupakan bentuk dari pembuatan wilayah administratif baru dari provinsi atau kabupaten/kota induknya.<sup>31</sup> Hal tersebut merupakan amanah dari ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang dasar tidak pernah terdapat perihal yang mengatur dalam pembentukan suatu daerah, tetapi dalam pasal tertentu dikatakan bahwa negara menghargai dan menghormati kesatuan-kesatuan. Dalam Peraturan pemerintah No. 78 tahun 2007 mengenai pemekaran wilayah dikatakan bahwa pemekaran daerah/wilayah merupakan bentuk pemecahan yang berupa Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan yang menjadi dua wilayah atau lebih.<sup>32</sup>

Dalam Peraturan Presiden juga dikatakan bahwa terdapat syarat dan kriteria dalam melakukan penghapusan ataupun pemekaran suatu wilayah, yakni:

1. Agar dapat mempercepat pelayanan pada masyarakat
2. Membuat pertumbuhan demokrasi menjadi cepat
3. Membangaun pembanguana Ekonomi daerah lebih cepat
4. Pengelolaan potensi daerah lebih cepat
5. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah

Pemekaran yang dilakuakn untuk membuat beberapa wilayah, seperti kabupaten baru merupakan usaha yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang kurang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan usha tersebut dibutuhkan keseimbangan dalam pemenuhan sumberdaya agar tidak adanya fenomena disparitas pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula ruang publik yang baru bagi suatu daerah yang telah dimekarkan agar dapat memenuhi kebutuhan bersama.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 mengenai Pemekaran Wilayah.

Pada dasarnya pemekaran suatu wilayah layaknya Kabupaten/kota dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat dengan usaha melakukan peningkatan pada setiap aspek. Hal tersebut berguna bagi suatu daerah agar dapat terjalin hubungan yang harmonis. Dalam hal juga dibutuhkan peningkatannya kualitas dalam pelayanan yang akan dibangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat berkembang daerah tersebut dan tidak terjadinya pemekaran wilayah lainnya.

## **1.7 Metode dan Prosedur Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian**

Dalam metode penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Dalam hal ini metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan guna meneliti suatu kelompok, suatu objek, manusia, suatu keadaan, pemikiran ataupun suatu jenis peristiwa yang akan mendatang.<sup>33</sup> Sedangkan, menurut Idris kealitatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap informan sebagai suatu subjek dalam penelitian dan juga dalam ruang lingkup kesehariannya. Oleh karena itu, para peneliti yang menggunakan metode kualitatif harus melakukan pendekatan yang cukup intens pada dunia informan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik dalam memahami simbol dan bahasa asli dari informan merupakan kunci keberhasilan dan juga nilai tambah.<sup>34</sup> Pada kualitatif teknik yang dikuatkan adalah teknik analisis dalam melakukan proses penarikan kesimpulan. Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada usaha gerakan masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai penggerak dari pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dimotori oleh ALU dan FKMATA yang hingga saat ini masih aktif dalam usahanya, seperti bagaimana proses terbentuknya gerakan masyarakat Kabupaten Bekasi, strukturisasi, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai tujuannya dan strategi apa yang digunakan dalam memperjuangkan

---

<sup>33</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm.54

<sup>34</sup> Muhamad Idrus. Op.Cit., hlm. 24

pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi. Kemudian, data yang telah didapat dilapangan akan dibandingkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti.

### **1.7.2 Tipe Penelitian**

Tipe peneliti merupakan suatu komponen yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian dengan pertanyaan dari penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe dekriptif. Peneliti menggunakan tipe deskriptif bertujuan guna dapat mempermudah dalam mengelola data yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan Aliansi Utara dan FKMATA dalam gerakan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi. Penggunaan tipe deskriptif juga akan memberikan temuan yang berguna untuk memperkaya hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti karena kualitatif dapat membantu peneliti dalam memberikan gambaran, situasi, fenomena dan mampu mempermudah dalam meringkas berbagai kondisi. Kualitatif juga dapat melihat realita permukaan sebagai suatu sifat, ciri dan fenomena tertentu. Penelitian ini juga dapat membantu peneliti dalam menghadapi situasi yang akan ditemui dilapangan. Situasi tersebut berupa kondisi permasalahan yang belum jelas atau sudah jelas.

### **1.7.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bekasi bagian Utara. Hal tersebut disebabkan lokasi tersebut merupakan daerah yang akan dijadikan sebagai sebuah kabupaten baru, yakni Kabupaten Bekasi Utara.

### **1.7.4 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan orang yang akan memberikan informasi terkait yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan penelitian.<sup>35</sup> Subyek nantinya akan dimintai keterangan mengenai data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini

---

<sup>35</sup> Tatang Amirin, *Menusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 93

peneliti akan mendapatkan informasi baik yang berhubungan dengan data diri dari informan, maupun yang berhubungan dengan Aliansi Utara yang merupakan topik penelitian ini.

Yang akan menjadi informan adalah:

- Ketua / koordinator Aliansi Utara (ALU) - Hj Shanusi Nasihun
- Ketua / Koordinator FKMATA (Forum Komunikasi Masyarakat Tarumanegara) – Syamsuri
- Masyarakat Kabupaten Bekasi (Random)

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

Data Primer

- Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  
Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hal tersebut bertujuan agar peneliti telah dapat menentukan informan yang akan didapatkan infomasinya. Data ini diperoleh dengan mengunakan teknik wawancara mendalam kepada informan. Dalam pertanyaan yang diajukan telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang hendak ingin diketahui. Selain menggunakan wawancara mendalam, peneliti juga melakukan wawancara terbuka untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan guna mendapatkan informasi penting. Wawancara terbuka juga digunakan agar tidak membuat informan merasa tidak nyaman.

Data Sekunder

- Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan menggunakan data tambahan yang dapat menunjang penelitian berupa berita, catatan, koran, dokumen inventaris Aliansi utara dan juga dapat berupa dokumen dari pemerintah. Metode ini digunakan untuk memperkaya hasil penelitaian dan juga menunjang data yang kurang.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan teknik analisis Miles dan Huberman yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam tekni tersebut peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian dan juga pemverisikasian data yang didapat, yang mana hal tersebutserupa dengan proses analias dari Miles dan Huberman.<sup>36</sup> Data yang telah dikumpulkan direduksi agar menjadi lebih dipilah dalam mengambil data yang diperlukan. Selanjutnya melakukan penyajian data, dalam hal ini peneliti menjadikan data yang telah direduksi dari data yang didapat dilapangan menjadi transkrip wawancara. Hal tersebut dialkukan guna dapat melakuakn penarikan kesimpulan. Pemverivikasian data dialakukan dengan menganalisis data yang telah tersajai dengan pisau teori yang sesuai dengan konsep dalam penelitian agar dapat menghasilakn data yang relevan. Dalam pemverifikasian data juga akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengelaborasi data yang didapat dengan data sekunder sebagai pelengkap dalam penelitian.

---

<sup>36</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia) Hlm. 20